

ISSN: 978-602-18517-0-8

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

MENINGKATKAN LAYANAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH
DALAM PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

24 Oktober 2015 di Aula A3 Universitas Negeri Malang



Editor:

Asep Sunandar
Desi Eri Kusumaningrum
Imam Gunawan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
2015

ISSN: 978-602-18517-0-8

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

MENINGKATKAN LAYANAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH
DALAM PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

24 Oktober 2015 di Aula A3 Universitas Negeri Malang



Editor:

Asep Sunandar

Desi Eri Kusumaningrum

Imam Gunawan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
2015

SAMBUTAN KETUA JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alhamdulillah kegiatan seminar nasional dan prosiding ini dapat berjalan dengan lancar. Seminar ini digagas dan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengembangkan sebuah formula sistem layanan guru dan kepala sekolah yang konstruktif terhadap potensi siswa. Permasalahan seputar perilaku dan budi pekerti akan lebih mudah diatasi apabila guru dan kepala sekolah memiliki standar dalam interaksi edukatif.

Kunci sukses pelaksanaan pendidikan tidak bisa terlepas dari peran yang dilakukan kepala sekolah dan guru. Menurut pendapat beberapa ahli posisi tersebut disebut sebagai *Headmaster and teacher are privileged position* yaitu posisi yang sangat istimewa yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Klien utama dari layanan kepala sekolah dan guru adalah para siswa, tingkat kualitas layanan yang disajikan akan sangat menentukan kualitas lulusan sekolah. Konteks layanan pendidikan tidak hanya yang termaktub dalam tugas pokok dan fungsi guru dan kepala sekolah, mengingat klien pendidikan adalah manusia yang memiliki potensi akal, pikir, karsa dan rasa maka cara melayaninya tidak statis melainkan dinamis dan fleksibel. Proses pelayanan harus melibatkan hati dan perasaan, hubungan siswa dan pendidik bersifat interaksi edukatif, dimana masing-masing individu memiliki peran yang saling mengisi.

Berapa permasalahan pendidikan yang bersumber dari siswa pada dasarnya adalah imbas dari pola interaksi akademik yang belum berjalan dengan baik. Kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, capaian nilai akademik yang rendah, perilaku pelajar yang kurang baik bisa jadi muara masalahnya adalah berada pada kualitas interaksi edukatif yang masih rendah. Ke depan pendidikan Indonesia akan lebih baik lagi.

Malang, 24 Oktober 2015

Dr. H. Ahmad Yusuf Sobri, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
Menumbuhkan Nilai Karakter Siswa di Sekolah Ahmad Yusuf Sobri	1
Kepemimpinan Visioner dalam Menumbuhkan Budaya Budi Pekerti Organisasi Sekolah Suarni	11
Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menumbuhkan Nilai Karakter Syuru Trihantoyo	25
Sistem Rekrutmen dan Manajerial Kompetensi Guru Honoror Asep Sunandar	36
Penumbuhan Budi Pekerti melalui Peran Orang Tua dan Guru Di Sekolah R. Bambang Sumarsono	46
Profesi Guru: 10 Tahun Setelah Undang-Undang Guru dan Dosen Disahkan Ahmad Nurabadi	56
Penumbuhan Budi Pekerti Peserta Didik Melalui Nilai-Nilai dan Etika Kepemimpinan Pendidikan dengan Pendekatan <i>Soft System Methodology</i> Imam Gunawan	65
Muhammad Syafei: Menjadi Manusia Merdeka Berpikir Harus, Manusia Priyayi Elit Jangan Teguh Triwiyanto	85
Penerapan Strategi Pembelajaran Mind Mapping di Sekolah Dasar Windyahing Hastuti	97
Guru Dengan Pemahaman Perilaku Komunikasi Anak dengan Autism Ade Dian Firdiana	111
Guru Yang Bekerja dengan Kecerdasan Spiritual Abu Bakar	120
Kemampuan Kepala Sekolah dan Guru dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Karakter Wiwik Widiyati	132

Penumbuhan Budi Pekerti Peserta Didik Ibrahim Bafadal	150
Efektifitas Kinerja Komite Sekolah dalam Layanan Mutu Pendidikan Fathurrahman	160
Strategi Manajerial Pemimpin dalam Membangun Budi Pekerti <i>Stakeholders</i> Organisasi Achmad Supriyanto	173
Kekepalasekolahan Burhanuddin	185
Kesinambungan Pendidikan Budi Pekerti Di Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Sulthoni	212
Strategi Penguatan Karakter Peserta Didik Oleh Kepala Sekolah Juharyanto	223

PENUMBUHAN BUDI PEKERTI PESERTA DIDIK MELALUI NILAI-NILAI DAN ETIKA KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN *SOFT SYSTEM METHODOLOGY*

Imam Gunawan

Email: imam.gunawan.fip@um.ac.id
Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang 5 Malang 65145

Abstract: cultivation of characters is a series of business growth and change that is planned and carried out consciously by all citizens of a nation, state, and government towards modernity in order to develop the nation. The success of learners character growth is influenced by the values and ethics education leadership shown by the principal. Leading with values is leading with the heart. Lead with moral ethics is leading with humanity. Soft Systems Methodology approach to be one of the alternatives that can be applied by the institution in order to foster moral learners. Principals and teachers into a decisive actor in the character growth learners. In addition to the values and ethics of leadership shown by the principal, the other component is the source for the growth of the learners character based on the results of the analysis of the soft system methodology are: (1) to actualize the noble values of Pancasila; (2) reorientation of the educational curriculum based on spiritual emotional quotient; (3) the implementation of the education unit level curriculum; (4) transformation of the values of religion and culture; (5) developing the values of society; and (6) develop local cultural wisdom.

Keywords: cultivation of characters, leadership values, ethical leadership, soft system methodology

Abstrak: Penumbuhan budi pekerti merupakan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh seluruh warga suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Keberhasilan penumbuhan budi pekerti peserta didik dipengaruhi oleh nilai-nilai dan etika kepemimpinan pendidikan yang ditampilkan oleh kepala sekolah. Memimpin dengan nilai adalah memimpin dengan hati. Memimpin dengan etika adalah memimpin dengan moral kemanusiaan. Pendekatan *Soft System Methodology* menjadi salah satu alternatif yang dapat diaplikasikan oleh lembaga pendidikan guna menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Kepala sekolah dan guru menjadi aktor penentu dalam penumbuhan budi pekerti peserta didik. Selain nilai-nilai dan etika kepemimpinan yang ditampilkan oleh kepala sekolah, komponen lain yang menjadi sumber guna penumbuhan budi pekerti peserta didik berdasarkan hasil analisis dengan *soft system methodology* adalah: (1) mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila; (2) reorientasi kurikulum pendidikan berbasis *emotional spiritual quotient*; (3) implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan; (4) transformasi nilai-nilai agama dan budaya; (5) mengembangkan tata nilai masyarakat; dan (6) mengembangkan kearifan budaya lokal.

Kata kunci: penumbuhan budi pekerti, nilai-nilai kepemimpinan, etika kepemimpinan, *soft system methodology*

Seiring dengan perkembangan jaman yang bersifat mengglobal, tatanan sosial masyarakat juga ikut mengalami perubahan. Budaya asing dapat masuk ke dalam sistem budaya bangsa

Indonesia dengan mudah, yang didukung dengan teknologi informasi yang tanpa mengenal tempat dan waktu dapat diakses dengan mudah. Jika tidak disaring dengan benar budaya asing yang masuk, maka akan terjadi pergeseran nilai-nilai dan etika sosial budaya masyarakat yang dikawatirkan cenderung destruktif. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya masif yang bersifat gerakan (bukan lagi bicara program, seperti yang digelorakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan) agar budaya asing yang masuk akan disaring dengan sistem nilai dan etika bangsa Indonesia, sehingga akan terjadi akulturasi budaya yang bersifat konstruktif. Apalagi dengan adanya sikap masyarakat yang cenderung inferior kepada budaya asing. Pergeseran nilai-nilai dan etika ini juga mempengaruhi budi pekerti seseorang dalam masyarakat. Hal ini harus disikapi dengan bijak. Pendidikan memegang peranan penting dalam perubahan sosial budaya manusia. Sosial budaya membentuk karakter suatu masyarakat. Sosial budaya membentuk tatanan nilai dan etika kemasyarakatan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang merupakan sistem sosial dan pranata sosial, memiliki tanggung jawab dalam mentransformasi sosial budaya bangsa kepada generasi sekarang, termasuk dalam hal ini adalah budi pekerti. Membentuk akhlak peserta didik menjadi hal yang krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran sekolah adalah sebagai pewaris, pemelihara, dan pembaharu kebudayaan. Hal ini dipertegas oleh Kartono (1977) yang berpendapat bahwa sekolah dapat dijadikan sebagai: (1) sentrum budaya untuk mengoperkan nilai dan benda budaya sendiri agar budaya nasional tidak hilang ditelan masa; (2) arena untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan modern, teknik, dan pengalaman; dan (3) bengkel latihan untuk mempraktikkan hak asasi manusia selaku warga negara yang bebas di tengah iklim demokrasi. Sekolah memiliki tugas mewariskan, memelihara, dan mengembangkan budaya yang tercermin dalam kurikulum.

PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

Penumbuhan budi pekerti dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, jelang memasuki tahun pelajaran baru 2015-2016 pada hari Jumat 24 Juli 2015 di kantor Kemendikbud. Penumbuhan budi pekerti (PBP) adalah pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah, yang dimulai sejak masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang Sekolah Dasar (SD), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sekolah pada jalur pendidikan khusus (Kemendikbud, 2015). Mendikbud menyatakan bahwa implementasi gerakan penumbuhan budi pekerti adalah upaya untuk menjadikan sekolah sebagai taman untuk menumbuhkan

karakter positif bagi para peserta didik (Kemendikbud, 2015). PBP akan fokus dilakukan melalui kegiatan nonkurikuler pada seluruh jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan peserta didik. PBP pada pelaksanaannya akan bersifat kontekstual atau disesuaikan dengan muatan lokal daerah. PBP ini akan dilaksanakan fokus melalui jalur nonkurikuler yang biasanya kurang dapat perhatian, padahal memiliki efek besar dalam belajar mengajar.

Penumbuhan budi pekerti terdiri dari tiga kata, yakni penumbuhan, budi, dan pekerti. Penumbuhan berasal dari kata tumbuh yang berarti timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1558). Budi artinya alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk; tabiat; akhlak; watak; perbuatan baik; kebaikan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:226). Sedangkan pekerti artinya perangai; tabiat; akhlak; watak; perbuatan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1140). PBP berarti segenap upaya mengembangkan akhlak manusia agar berperilaku baik, berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat. PBP juga dapat diartikan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh seluruh warga suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Budi pekerti menentukan tingkah laku manusia, sehingga salah satu faktor penyebab yang lazim dijadikan “kambing hitam” terjadinya tingkah laku warga negara yang tak terpuji ialah pekerti masyarakat yang mulai bergeser, bahkan menurun kualitasnya. Kondisi demikian menurut Gunawan (2012:67-68) dipengaruhi oleh tren dunia yakni globalisasi, yang memungkinkan informasi dapat masuk dengan tidak terbatas (*borderless information*). Di dalam situasi yang seperti ini terjadilah proses lintas budaya (*trans-cultural*) dan silang budaya (*cross cultural*) yang kemudian mempertemukan nilai-nilai budaya satu dengan yang lainnya. Pertemuan nilai-nilai budaya (*cultural contact*) dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu: (1) asimilasi, pertemuan tanpa menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna; dan (2) akulturasi, pertemuan yang membuahkan nilai-nilai baru yang bermakna.

Salah satu fungsi dari sekolah mencakup fungsi sosial. Sekolah dalam menjalankan fungsi sosial harus mampu mensosialisasikan peserta didik, sehingga mereka nantinya bisa mengubah diri mereka dan masyarakatnya. Masyarakat merupakan sebuah tempat yang menjadi tempat hidup, tumbuh, berkembang dan berubah bagi manusia. Sekolah berupaya menggali dan mewariskan nilai-nilai dan etika yang bersumber pada kearifan lokal dalam membangun kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya kurikulum sekolah,

memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan karakter bangsa dibandingkan kurikulum masa sebelumnya. PBP menjadi hal yang krusial untuk dilaksanakan secara masif dalam rangka membangun bangsa. Selama sebuah bangsa menganggap bahwa modal pembangunan yang penting adalah sumber daya alam, maka selama itu pula bangsa tersebut tidak akan maju atau sulit maju. Sumber daya manusia merupakan faktor pertama dan utama modal membangun bangsa, yang di dalamnya menyangkut aspek budi pekerti manusia sebagai sebuah bangsa.

NILAI DAN ETIKA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolahnya menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program pendidikan, termasuk penumbuhan budi pekerti kepada peserta didik. Orang sebelum melihat sekolah secara keseluruhan, akan melihat kepala sekolah terlebih dahulu. Kepala sekolah menjadi model bagi semua warga sekolah, baik guru, staf, masyarakat, dan peserta didik. Demikian besarnya kedudukan kepala sekolah, sehingga tepat jika ada pernyataan: tidak ada peserta didik yang tidak berhasil dididik, yang ada adalah guru yang tidak berhasil mendidik; tidak ada guru yang tidak berhasil mendidik, yang ada adalah kepala sekolah yang tidak mampu membuat guru berhasil mendidik. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi penentu dalam menggerakkan semua warga sekolah mencapai tujuan pendidikan sekolah. Gunawan (2015b:28) menyatakan bahwa kepala sekolah dapat dikatakan seorang dirigen lagu yang mampu memandu dan mengkoordinasi semua anggotanya, mengakomodasikan potensi sekolah, menciptakan iklim sekolah yang harmonis, dan mengkondisikan kultur sekolah yang dinamis.

Keberhasilan sekolah ditentukan oleh kepala sekolah dalam menjalankan segala perannya sebagai pemimpin pendidikan. Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Gunawan (2015a:304) mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sekolahnya, harus mempengaruhi dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik dan benar, sebelum memengaruhi orang lain untuk berbuat baik dan benar, hal ini dimaksudkan dalam rangka upaya secara kontinu membangun kapasitas dan kemampuannya dalam memimpin sekolah. Jika kepala sekolahnya melakukan hal yang baik dan benar, maka proses untuk memengaruhi warga sekolah agar berbuat dengan baik dan benar juga semakin mudah. Kepala sekolah dalam hal ini sebagai teladan bagi warga sekolah. Keteladanan kepemimpinan kepala sekolah ini bersumber dari penerapan nilai dan etika dalam kepemimpinan. Penerapan nilai dan etika

dalam kepemimpinan tercermin dari sifat dan perilaku kepala sekolah. Hal yang sangat mudah diingat oleh orang adalah sifat dan perilaku orang lain. Sehingga hal diingat oleh guru dan peserta didik dari kepala sekolahnya adalah juga sifat dan perilaku kepala sekolah.

Memimpin dengan nilai adalah memimpin dengan hati. Kepemimpinan tanpa menyertakan nilai dan etika adalah sebuah kepemimpinan yang digerakkan oleh ototarianisme belaka. Gunawan (2015a:305) menyatakan bahwa nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nilai-nilai kepemimpinan menitikberatkan pada kepemilikan karakter kepribadian, sosial, atau intelektual yang membedakan pemimpin dari yang bukan pemimpin. *Good leader is good person*. Hal ini dipertegas oleh Kusmintardjo (1989:252) yang menyatakan bahwa apa yang membuat seseorang pemimpin berhasil (efektif) adalah sumber dari *personality* (kepribadian) pemimpin itu sendiri sebagai seorang insan.

Pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa menjadi acuan universal nilai-nilai kehidupan. Kepemimpinan pendidikan juga harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gunawan (2012:74-75) menyatakan bahwa Pancasila sebagai inti karakter bangsa Indonesia, mengandung lima pilar karakter, yakni: (1) transendensi, menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dari-Nya akan memunculkan penghambaan semata-mata pada Tuhan, kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan alam sekitar sehingga mampu memakmurkannya; (2) humanisasi, setiap manusia pada hakikatnya setara di hadapan Tuhan kecuali ketakwaan dan ilmu yang membedakannya, manusia diciptakan sebagai subjek yang memiliki potensi; (3) kebhinekaan, kesadaran akan ada sekian banyak perbedaan di dunia, akan tetapi mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan; (4) liberasi, pembebasan atas penindasan sesama manusia, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya penjajahan manusia oleh manusia; dan (5) keadilan, merupakan kunci kesejahteraan, adil tidak berarti sama, tetapi proporsional.

Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah integritas dan moralitas, tanggung jawab, visi pemimpin, kebijaksanaan, keteladanan, menjaga kehormatan, kemampuan berkomunikasi, komitmen meningkatkan kualitas (Gunawan, 2015a:305-305). Nilai kepemimpinan yang diwariskan oleh tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah Tut Wuri Handayani menjadi sangat populer saat ini yaitu *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, ing wuri handayani*

(Ragil, 2009:1). Seorang pemimpin harus bisa diteladani, harus mampu membangun karsa dan semangat bagi yang dipimpin, dan harus mampu memberi dorongan. Dan bukan sebaliknya.

Nandika menyatakan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki butir-butir nilai yang bersifat operasional (Ragil, 2009:3-4). *Ing ngarso sung tulodo* memiliki makna bahwa seorang pemimpin itu: (1) amanah, yakni dapat dipercaya, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang teguh pada sikap-sikap kejujuran dan integritas yang tinggi; (2) visioner, yakni memiliki wawasan ke depan yang lebih baik dan lebih tepat dengan berlandaskan ilmu pengetahuan, informasi, dengan kebajikan yang utuh, dan mutakhir; (3) profesional, artinya dalam bekerja senantiasa menggunakan keahlian, kemahiran ataupun kecakapan yang memenuhi standar etika yang telah ditetapkan; (4) akuntabel, yakni bertanggung jawab pada setiap tindakan dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh pertimbangan; (5) disiplin, yakni setiap norma, aturan, tata tertib dan tata waktu yang telah ditetapkan selalu dipatuhi; (6) produktif, yakni mampu memberikan hasil yang optimal dari yang ditargetkan; dan (7) pebelajar sepanjang hayat, yakni dalam melaksanakan tugas selalu didasari pada semangat untuk menjadi lebih tahu dan terampil guna memberikan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Ing madyo mangun karsa bermakna bahwa seorang pemimpin itu memiliki: (1) motivasi yang tinggi, yakni bersemangat yang tinggi dalam setiap melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang optimal; (2) kreatif, yakni mampu menggunakan daya cipta, pola pikir, metode dan cara yang tepat dengan menggunakan sumber daya yang ada; (3) membudayakan, yakni senantiasa berupaya dan bertindak untuk membiasakan menerapkan nilai-nilai dasar yang berkembang dalam lingkungan kerjanya maupun di masyarakat; (4) bersinergi, yakni mampu menggabungkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak terkait sehingga dapat memberikan total hasil dan dampak positif oleh masing-masing pihak; (5) berorientasi mutu, yakni selalu berusaha untuk menghasilkan produktivitas yang melebihi standar mutu yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia; dan (6) inovatif, yakni mampu mendapatkan cara pandang, pola pikir, metode, dan cara-cara praktis pada setiap menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Tut wuri handayani dimaknai bahwa seorang pemimpin itu selalu: (1) peduli, yakni senantiasa berlandaskan pada sikap-sikap saling menghargai, memahami, dan mengembangkan prinsip, sikap, perilaku, dan kepentingan pihak lain; (2) kemanusiaan, yakni

selalu menegakkan untuk mendukung kepentingan nasional, kemanusiaan, dan lingkungan; (3) menginspirasi, yakni senantiasa mengembangkan budaya kerja yang selalu memberikan inspirasi, pencerahan, dan dorongan semangat untuk bekerja lebih baik, lebih berkualitas, terhadap teman sejawat, dan mitra kerjanya; (4) memberdayakan, yakni selalu berusaha memberitahukan, menunjukkan, atau menyadarkan tentang potensi yang dimiliki oleh pihak lain dan juga membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki; dan (5) demokratis dan berkeadilan, yakni setiap sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugasnya senantiasa bersikap terbuka terhadap prinsip, pendapat, sikap dan tindakan pihak lain untuk kepentingan peningkatan kualitas hasil kerjanya.

Menelaah nilai-nilai kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat diketahui bahwa ketiga nilai tersebut merupakan sumber kearifan budaya lokal bangsa Indonesia. Kearifan lokal budaya Indonesia menjadi sumber berpikir, berperilaku, dan bertindak segenap komponen bangsa. Indonesia yang merupakan bangsa besar memiliki keragaman budaya yang sangat kaya untuk digali guna memajukan bangsa. Setiap daerah memiliki kearifan lokal tersendiri. Gunawan (2012:75-76) menyatakan bahwa kerarifan lokal juga merupakan *cultural identity*, yakni identitas bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak sendiri. Hal ini perlu dilakukan, sebab jangan sampai masyarakat merasa asing dengan budayanya sendiri.

Memimpin dengan etika adalah memimpin dengan moral kemanusiaan. Gunawan (2015a:308) menyatakan bahwa etika dapat menjadi faktor kunci keberhasilan suatu kepemimpinan. Kepemimpinan yang dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip beretika. Etika dalam kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam mendukung keberlanjutan nilai. Seorang pemimpin selain harus memperhatikan nilai yang ada juga harus mematuhi etika yang berlaku dalam lingkungannya. Pemimpin pendidikan dalam setiap tindakan harus selalu berpikir apakah itu benar dan itu salah untuk dilakukan. Memperhatikan apakah tindakannya sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat dan apakah tindakan itu pantas dilakukan untuk seorang pemimpin yang merupakan panutan untuk bawahannya.

Lebih lanjut Gunawan (2015a:308) mengemukakan bahwa etika dalam kepemimpinan seperti: (1) menjaga perasaan orang lain; (2) menyelesaikan masalah dengan rendah hati; (3) menghindari pemaksaan kehendak, tetapi menghargai pendapat orang lain; (4) mengutamakan proses dialogis dalam menyelesaikan masalah; (5) menanggapi suatu masalah dengan cepat dan sesuai dengan keahlian; (6) menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki; dan

(7) mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Sedangkan menurut Rukmana (2014:9) menyatakan bahwa etika kepemimpinan erat kaitannya dengan nilai-nilai luhur Pancasila, sebab etika kepemimpinan merupakan aktualisasi nilai-nilai instrumental Pancasila yang terpatri dalam UUD 1945.

Nilai instrumental Pancasila yang menjadi muatan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam berbangsa dan bernegara adalah instrumen keorganisasian, kelembagaan, kekuasaan, dan kebijakan pemerintah. Keempat instrumen tersebut sekaligus merupakan instrumen dalam penyelenggaraan pemerintah dan menjadi ruang gerak etika kepemimpinan aparatur. Etika kepemimpinan dengan demikian menurut Rukmana (2014:9-11) pada hakikatnya dapat dikategorikan menjadi menjadi empat macam yaitu etika keorganisasian, etika kelembagaan, etika kekuasaan, dan etika kebijaksanaan.

Etika keorganisasian adalah agar ruang gerak perilaku kepemimpinan harus sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan dalam organisasi. Organisasi menetapkan nilai dan norma yang menjadi acuan perilaku seluruh anggota organisasi. Etika kelembagaan mengisyaratkan agar gerak dinamika kepemimpinan haruslah senantiasa melembaga, dan kelembagaan organisasi harus akomodatif terhadap perkembangan lingkungan strategis (internal dan eksternal). Aktualisasi etika kelembagaan dalam kepemimpinan akan menghasilkan gaya kepemimpinan kolektif-konsultatif. Etika kekuasaan menghendaki adanya pembatasan kekuasaan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada seorang pemimpin. Etika kekuasaan juga menghendaki pelaksanaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem organisasi guna menghindari terjadinya otoritaristik. Etika kebijaksanaan identik dengan perilaku kepemimpinan yang mengutamakan keterbukaan, kreativitas, dan inisiatif serta konsistensi. Keterbukaan meluaskan keefektifan artikulasi kepentingan kreatif, inisiatif meluaskan seni agregasi kepentingan, dan konsistensi melapangkan implementasi kebijaksanaan secara efektif dan efisien.

PENDEKATAN *SOFT SYSTEM METHODOLOGY*

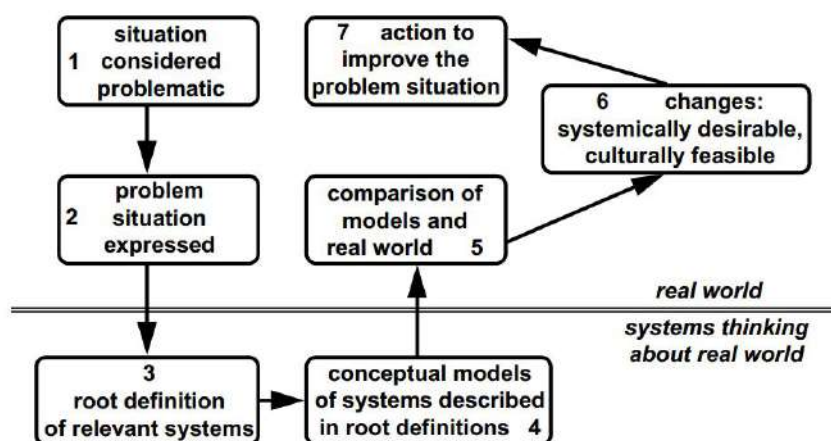
Soft System Methodology (SSM) merupakan salah satu metode analisis dengan *systems thinking* untuk menganalisis situasi dunia nyata dengan kompleks dan problematik, seperti halnya dalam penumbuhan budi pekerti peserta didik melalui nilai-nilai dan etika kepemimpinan pendidikan. Hal ini dipertegas oleh Checkland dan Scholes (1990) yang menyatakan *SSM can be applied to all areas of planning, in the public or private sector, where human beings are operating in social roles trying to take purposeful action*. Checkland

dan Poulter (2006) menyatakan bahwa SSM adalah proses mencari tahu yang berorientasi pada aksi (*action*) atas situasi problematis dari kehidupan nyata sehari-hari. Para pengguna SSM melakukan pembelajaran yang dimulai dari menemu-kenali situasi sampai merumuskan dan/atau mengambil tindakan guna memperbaiki situasi problematis tersebut.

Proses pembelajaran terjadi melalui proses yang terorganisasi di mana situasi nyata dieksploitasi, dengan menggunakan alat intelektual, sehingga memungkinkan terjadinya diskusi secara terarah, kemudian dituangkan dalam sejumlah model aktivitas yang dibangun berdasarkan sudut pandang (*worldviews*) yang murni. Hal ini sesuai dengan pendapat Khisty (1995:105-106) yang mengemukakan bahwa:

SSM is a process of learning and enquiry. The learning is about complex, problematically human activity systems, eventually to taking purposeful action aimed at improvement. SSM is also a process of managing, where managing is interpreted very broadly as a process of achieving organized action.

Mengacu pada pendapat Checkland dan Poulter (2006) tersebut, Rukmana (2009:120) menyimpulkan bahwa pada prinsipnya SSM memiliki tiga ciri utama, yakni: (1) pemahaman dan analisis atas situasi masalah; (2) analisis relasi dan peran para pihak terkait; dan (3) analisis dan peran sosial para pihak terkait. Checkland (1999) menegaskan bahwa dalam SSM, situasi dianggap tempat bersemayamnya suatu masalah, dinyatakan tidak dalam terminologi serba sistem, melainkan dalam konsep struktur dan proses, serta hubungan di antara keduanya. Lebih lanjut Checkland (1999) menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengaplikasikan SSM adalah: (1) mendeskripsikan situasi problematik (*situation considered problematic*); (2) mengekspresikan situasi problematik dalam bentuk *rich picture* (*problem situation expressed*); (3) merumuskan *root definition* (*root definition of relevant systems*); (4) membuat model konseptual yang berupa aktivitas manusia (*conceptual models of systems described in root definitions*); (5) membandingkan model konseptual dengan dunia nyata (*comparison of models and real world*); (6) merumuskan perubahan yang harus dilakukan (*changes systemically desirable, culturally feasible*); dan (7) menyusun langkah tindakan perbaikan (*action to improve the problem situation*). Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengaplikasikan SSM diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Langkah-langkah *Soft System Methodology*

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan langkah-langkah SSM adalah Tahap 1 *Situation Considered Problematic*, masalah yang dimaksudkan lebih sesuai disebut *problem situation*, karena umumnya masalah yang harus diselesaikan lebih dari satu sehingga perlu identifikasi satu per satu. Tahap 2 *Problem Situation Expressed*, mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan *observation*, *interview*, *workshop*, dan *discussion* yang dilanjutkan dengan formulasi dan presentasi masalah-masalah tersebut, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk *rich picture*. Tahap 3 *Root Definitions of Relevant Systems*, mengkaitkan masalah terhadap sistem yang ada, yang dilanjutkan dengan membuat *root definitions* yang menjelaskan proses / transformasi untuk mencapai tujuan (*to do X, by Y, to achieve Z*), untuk menguji *root definitions* tersebut dengan melakukan *CATWOE Analysis* (*customers, actors, transformation, worldview, owners, and environmental constrains*). Tahap 4 *Conceptual Models*, membuat model sistem konseptual untuk masing-masing sistem, model digambarkan dengan *activity model*, yang dilanjutkan dengan menentukan dan mengukur kinerja (*performance*) model tersebut (*efficacy, efficiency, and effectiveness*). Tahap 5 *Comparisons with Reality*, membandingkan antara model konseptual tersebut dengan kenyataannya dan biasanya akan timbul ide-ide baru untuk perubahan. Tahap 6 *Debate about Change*, bersama-sama dengan *stakeholders* hasil-hasil tahapan sebelumnya diskusikan, hasilnya adalah perubahan, dan perubahan tersebut harus sistematis (cara maupun tujuan) dan *feasible* untuk dilaksanakan.

PENUMBUHAN BUDI PEKERTI PESERTA DIDIK MELALUI NILAI-NILAI DAN ETIKA KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN *SOFT SYSTEM METHODOLOGY*

Berangkat dari asumsi bahwa penumbuhan budi pekerti (PBP) peserta didik merupakan sesuatu yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor (multidimensional), maka perlu adanya sebuah pendekatan guna mencapai hal tersebut. Pendekatan *Soft System Methodology* (SSM) menjadi salah satu alternatif yang dapat diaplikasikan oleh lembaga pendidikan guna menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Hal ini dipertegas oleh Yadin (2013:353) yang mengemukakan bahwa *since SSM is widely used for investigating messy situations helping better understand the system while considering many view points, it was chosen for the study.*

Kepala sekolah dan guru menjadi aktor penentu dalam PBP peserta didik. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sebuah gerakan yang masif guna menumbuhkan budi pekerti peserta didik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan menjadi krusial dalam penumbuhan budi pekerti. Guru sebagai pendidik juga menjadi penentu dalam PBP peserta didik. Peran kepala sekolah tak dapat diabaikan dalam PBP peserta didik, karena kepala sekolah memiliki peran membina guru yang profesional dan peserta didik yang berkarakter. Nilai-nilai dan etika kepemimpinan yang ditampilkan kepala sekolah menjadi penentu keberhasilan program pendidikan karakter di sekolah. Memimpin dengan nilai adalah memimpin dengan hati. Memimpin dengan etika adalah memimpin dengan moral kemanusiaan. Jika ingin peserta didik berkarakter, kepala sekolah dan gurunya dahulu yang harus berkarakter. Guru merupakan teladan bagi para peserta didiknya. Pengembangan karakter peserta didik akan efektif manakala kepala sekolah dan guru bersinergi. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dan guru sebagai pemimpin pembelajaran selalu menampilkan perilaku yang baik. Kepala sekolah dan guru menjadi contoh bagi para peserta didiknya.

Berikut ini akan diuraikan tahapan penumbuhan budi pekerti peserta didik melalui nilai-nilai dan etika kepemimpinan pendidikan dengan pendekatan *soft system methodology*.

1. Tahap 1 *Situation Considered Problematic*

Situasi problematik yang dimaksud adalah peserta didik berperilaku yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Peristiwa yang menyangkut peserta didik berperilaku tidak sesuai dengan norma dan etika seperti menyontek saat ujian, perkelahian antarpelajar, penganiayaan, minum minuman keras, menggunakan obat terlarang, dan bahkan sampai dengan pembunuhan. Selain itu ada pergeseran perilaku peserta didik

yang semakin jauh dari budaya bangsa. Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa digempur oleh masuknya budaya-budaya asing. Budaya tersebut tentunya mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik. Ditambah lagi muncul sikap yang bangga jika menggunakan produk atau menerapkan gaya yang sama dengan budaya asing. Ada semacam penurunan efikasi pada diri generasi muda sekarang.

Misalnya jika laki-laki tidak minum minuman keras, maka ia dianggap tidak mengikuti perkembangan jaman. Atau perempuan yang memakai rok mini atau pakaian ketat, akan dikatakan itu merupakan gaya masa kini, sedangkan perempuan yang memakai busana menutup aurat akan dikatakan “sok iman”. Inilah contoh pergeseran nilai dan etika di kalangan generasi muda. Namun hal ini juga tidak mengesampingkan peserta didik yang memiliki perilaku sopan santun, beretika, berprestasi, dan ikut serta juga memikirkan bangsa. Kondisi seperti ini juga dipengaruhi oleh media massa yang dapat dikatakan sering mengekspos kejadian yang kurang baik. *Bad news is good news*. Apa yang dilihat dan didengar orang akan mempengaruhi perilaku dan pikiran orang.

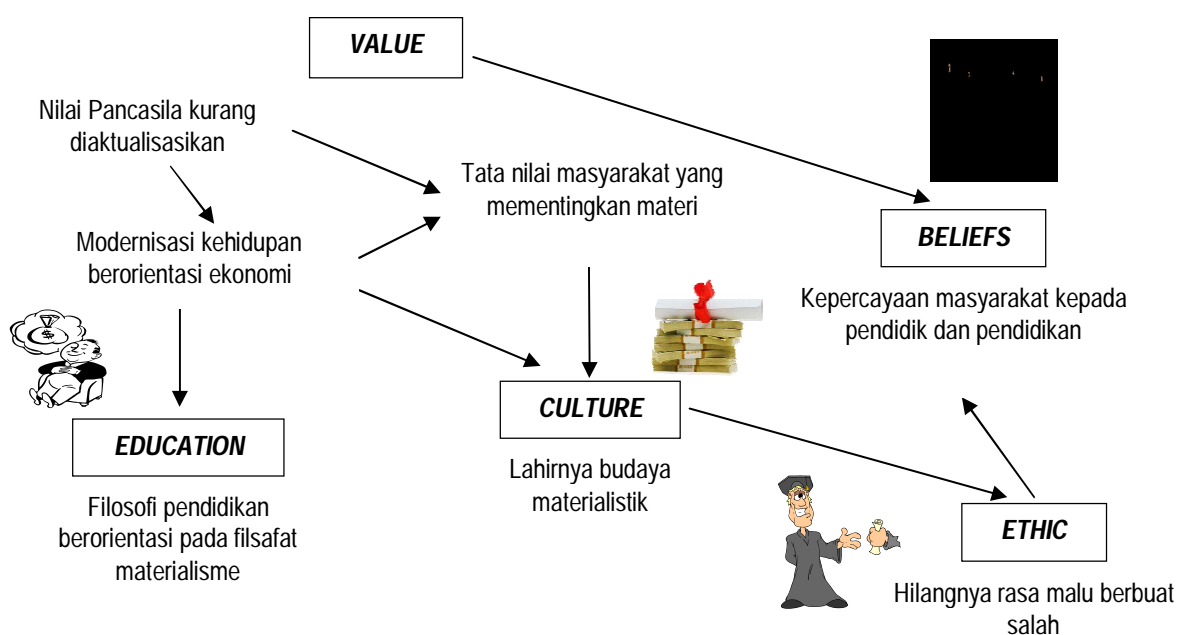
Peserta didik yang berprestasi, misalnya juara olimpiade, juara ajang olah raga, atau juara ajang seni luput dari pemberitaan. Sehingga masyarakat menganggap lembaga pendidikan kurang memiliki andil dalam penumbuhan budi pekerti. Apalagi akhir-akhir ini pendidikan tercoreng, beberapa perguruan tinggi dinonaktifkan oleh Kemenristekdikti, karena menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi semacam ini harus disadari dan memerlukan aksi semua elemen bangsa. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi meningkatkan mutu pendidikan. Tak dapat dipungkiri bahwa peserta didik tidak hanya berada dalam lembaga pendidikan saja, melainkan juga ia berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga menjadi krusial hubungan sekolah dengan masyarakat terjalin dengan baik dalam menumbuhkan budi pekerti. Penumbuhan budi pekerti menjadi krusial dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Kepala sekolah dan guru menjadi aktor utama dalam menumbuhkan budi pekerti kepada peserta didik.

2. Tahap 2 Problem Situation Expressed

Ketika pendidikan kehilangan ruhnya, maka tatanan kehidupan akan tidak ideal. Hal-hal yang diuraikan pada Tahap 1 merupakan sesuatu yang nyata terjadi di masyarakat. Pendidikan sekarang cenderung mengarah kepada konsep transaksional, di mana pembelajaran yang dilakukan antara guru dan peserta didik seperti transaksi. Pendidikan kehilangan nuansa spiritualitas dan moralitas. Jiwa Pancasila disinyalir juga luntur di

kalangan peserta didik. Kasus plagiasi terjadi di sendi kehidupan pendidikan. Kepercayaan masyarakat terhadap guru pun dapat dirasakan sekarang turun jika dibandingkan dengan dekade tahun 1960an. Misalnya jika anak melapor kepada orang tua bahwa saat di sekolah ia dicubit telinganya (*dijewer*) oleh gurunya, maka orang tua jaman dulu juga memarahi anaknya, karena dianggap tidak belajar dengan baik. Sekarang kondisi ini berubah, jika anak melapor kepada orang tua bahwa saat di sekolah ia dicubit telinganya (*dijewer*) oleh gurunya, maka orang tua cenderung melaporkan ke Polisi. Betapa kepercayaan masyarakat kepada guru sekarang sedikit berkurang jika dibandingkan dengan jaman dahulu.

Mengacu kepada fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sekarang ini mendasarkan pada filsafat materialisme. Lembaga pendidikan sebatas formalitas ijazah semata. Ditambah lagi dengan pendidikan yang cenderung berpihak kepada kalangan beruang. Kalangan pendidikan pun mengukur kesuksesan dengan materi. Apresiasi terhadap karya akademik menjadi nomor sekian. Evaluasi pendidikan masih menitikberatkan pada ranah kognitif, sedangkan afektif dan psikomotorik belum dioptimalkan. Lembaga pendidikan disinyalir belum sepenuhnya menegakkan nilai-nilai kejujuran intelektual dan tanggung jawab profesional. Jika mengacu pada paparan tersebut, maka situasi problematik terkait dengan *education, values, ethics, culture*, dan *beliefs* yang berpengaruh pada sikap dan perilaku orang (peserta didik, guru, dan kepala sekolah). Berdasarkan situasi problematik diilustrasikan *rich picture* seperti pada Gambar 2.



Gambar 2 Rich Picture

3. Tahap 3 *Root Definitions of Relevant Systems*

Guna memperbaiki situasi problematik yang dipaparkan di atas, perlu adanya formula dalam bentuk *root definitions* yang bertujuan untuk merestrukturisasikan berbagai pandangan (*rich picture*) dalam bentuk deskripsi pernyataan. *CATWOE Analysis* digunakan untuk mengembangkan penyusunan *root definitions*. Adapun *CATWOE Analysis* ditampilkan pada Tabel 1.

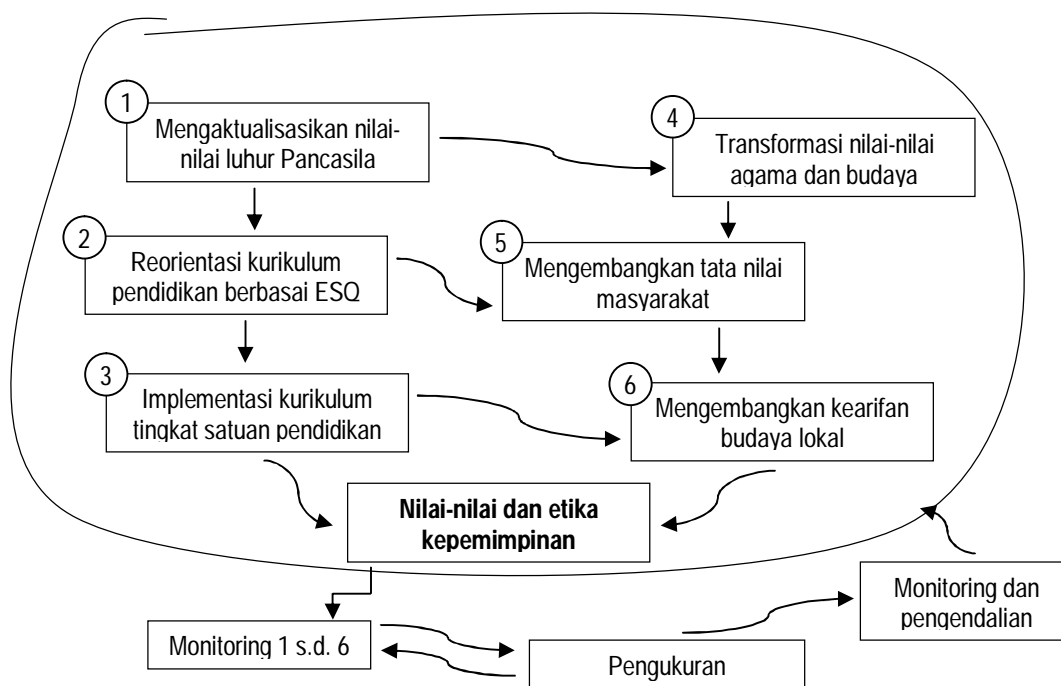
Tabel 1 *CATWOE Analysis*

<i>Customers</i>	Masyarakat
<i>Actors</i>	Kepala sekolah, guru, staf, peserta didik
<i>Transformation</i>	Penumbuhan budi pekerti
<i>Worldview</i>	Penguatan perilaku yang baik (<i>good character</i>) dan reduksi perilaku yang tidak baik
<i>Owners</i>	Sekolah
<i>Environmental constrains</i>	Kepemimpinan, nilai dan etika kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah

Berdasarkan Tabel 1 *CATWOE Analysis*, formulasi *root definitions* adalah penumbuhan budi pekerti peserta didik melalui nilai-nilai dan etika kepemimpinan pendidikan. Upaya PBP ini melibatkan guru. Peran guru menjadi krusial, sebab dengan gurulah peserta didik sering bertemu. Guru menjadi teladan bagi peserta didiknya. Proses ini akan berdampak pula kepada masyarakat, karena mereka nantinya yang akan memakai lulusan lembaga pendidikan.

4. Tahap 4 *Conceptual Models*

Root definitions merupakan upaya untuk menstrukturkan berbagai struktur dan persepsi dari *worldview* dengan iterasi terus menerus, sehingga substansi *root definitions* menjadi gambaran problematik nyata (*real world*). Selanjutnya untuk mengetahui apakah transformasi pada dunia nyata yang tergambar dalam *rich picture* (Gambar 2) secara realistis dapat diselesaikan atau diperoleh solusinya, perlu dibangun model konseptual, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.



Gambar 3 Model Konseptual

Model konseptual sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3 menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan (*human activity*) dalam menyelesaikan krisis perilaku peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Langkah tersebut adalah diawali dengan dua kegiatan paralel yang harus dilakukan yakni mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan transformasi nilai-nilai agama dan budaya dalam tatatan kehidupan lembaga pendidikan. Langkah berikutnya ialah reorientasi kurikulum yang berbasis *emotional spiritual quotient* (ESQ) dan implikasinya pada tingkat satuan pendidikan. Ketika transformasi nilai-nilai agama dan budaya telah optimal dilakukan, diharapkan dapat mengembangkan tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada kekayaan budaya kearifan budaya lokal. Kesemua komponen tersebut dijadikan landasan dalam mengembangkan nilai-nilai dan etika kepemimpinan pendidikan yang bernafaskan keindonesiaan dan budaya-budaya lokal.

5. Tahap 5 Comparisons with Reality

Sebagaimana telah diilustrasikan pada Gambar 3 bahwa terdapat 6 komponen yang direkonstruksikan dalam rangka penguatan PBP peserta didik, yang keenam komponen tersebut saling terhubung dan saling mempengaruhi serta saling mendukung dalam rangka PBP peserta didik. Model konseptual tersebut dikomparasi dengan dunia nyata (*real world*)

untuk didiskusikan (*debate about change*) dalam rangka memperoleh pandangan-pandangan dari *worldview* (Tabel 2).

Tabel 2 Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata

No	Aktivitas Dalam Model Konseptual	Kondisi Dunia Nyata
1	Mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila	Nilai-nilai luhur Pancasila saat ini sudah mulai dilupakan dan belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara
2	Reorientasi kurikulum pendidikan berbasis ESQ	Filosofi pendidikan saat ini masih mendasarkan pada filsafat materialisme dan masih berorientasi transaksional
3	Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan	Kurikulum yang diterapkan belum optimal dalam menggali kearifan lokal
4	Transformasi nilai-nilai agama dan budaya	Nilai-nilai agama dan budaya belum sepenuhnya ditransformasikan dalam berbagai kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan bermasyarakat
5	Mengembangkan tata nilai masyarakat	Tata nilai masyarakat (dan juga pelaku pendidikan) saat ini cenderung menghargai seseorang dari aspek materi semata
6	Mengembangkan kearifan budaya lokal	Kearifan lokal tergerus dan dilupakan generasi muda seiring dengan perkembangan budaya global

Monitoring terhadap keenam komponen tersebut dilakukan dengan membangun sistem pengendalian intern serta memasukkan unsur *efficacy*, *efficiency*, dan *effectiveness*. Kegiatan-kegiatan dalam model konseptual tersebut merupakan rangkaian alternatif-alternatif yang memerlukan aksi tindak lanjut untuk mencapai transformasi yang diinginkan.

6. Tahap 6 *Actions to Improve*

Setelah menbandingkan model konseptual dengan dunia nyata (*real world*), selanjutnya disusun langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka melakukan perubahan sebagai alternatif menyelesaikan masalah PBP peserta didik. Perubahan dan langkah perbaikan yang dilakukan dalam setiap aktivitas model diharapkan akan mencapai sasaran PBP peserta didik secara menyeluruh (Tabel 3).

Tabel 3 Perubahan dan Langkah Perbaikan

No	Aktivitas Dalam Model Konseptual	Perubahan dan Langkah Perbaikan
1	Mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila	Menambah jumlah jam pelajaran Pancasila, perubahan pola penilaian dari kognitif ke afektif, sosialisai nilai-nilai luhur Pancasila
2	Reorientasi kurikulum pendidikan berbasis ESQ	Mengembangkan kurikulum pendidikan dengan pengkayaan matapelajaran yang berbobot pada peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual
3	Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan	Sekolah mengembangkan kurikulum sendiri yang berbasis pada corak sekolah serta kearifan lokal (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi)
4	Transformasi nilai-nilai agama dan budaya	Nilai-nilai univerisal ajaran agama dan budaya perlu dituangkan dalam bentuk kurikulum pendidikan, tidak sebatas pada pencapaian kognitif, tetapi pada aspek afektif dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari

No	Aktivitas Dalam Model Konseptual	Perubahan dan Langkah Perbaikan
5	Mengembangkan tata nilai masyarakat	Masyarakat idealnya menghargai aspek keilmuan, atau orang yang selalu berupaya mencari ilmu dan berkarya (selain aspek materi)
6	Mengembangkan kearifan budaya lokal	Memasukan nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum (agar peserta didik tidak merasa asing dengan budayanya sendiri)

Melalui perubahan dan langkah perbaikan, peserta didik diharapkan memiliki perilaku, budi pekerti, dan karakter yang mengacu pada nilai-nilai dan etika yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal budaya Indonesia. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi penentu keberhasilan PBP peserta didik, sehingga kepemimpinan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai dan etika menjadi krusial diimplementasikan. Peran guru pun juga menentukan guna PBP peserta didik, sebab guru merupakan teladan bagi peserta didiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dengan SSM seperti yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa PBP peserta didik dapat dilakukan dengan pendekatan multidimensional, yakni mencakup aspek agama, budaya, pendidikan, dan tata nilai masyarakat, serta nilai-nilai dan etika kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor penentu keberhasilan PBP peserta didik, karena dengan kepemimpinan yang efektif kepala sekolah dapat menggerakkan semua warga sekolah ke arah yang lebih baik, selain itu juga dengan kepemimpinan yang baik kepala sekolah dapat juga mentransformasi nilai-nilai positif kepada semua warga sekolah. Jika hal ini terjadi, maka lembaga sekolah menjadi sentrum dan agen perubahan.

Kehidupan kemasyarakatan ditopang pula oleh tata nilai yang ada di sekolah, sehingga tata nilai masyarakat baik manakala tata nilai di sekolah juga baik, dan hal ini bersifat timbal balik. Nilai-nilai dan etika kepemimpinan yang ditampilkan oleh kepala sekolah menjadi faktor penentu dalam PBP peserta didik. Memimpin dengan nilai adalah memimpin dengan hati. Memimpin dengan etika adalah memimpin dengan moral kemanusiaan. Selain nilai-nilai

dan etika kepemimpinan yang ditampilkan oleh kepala sekolah, komponen lain yang menjadi sumber guna PBP peserta didik berdasarkan hasil analisis dengan SSM adalah: (1) mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila; (2) reorientasi kurikulum pendidikan berbasis ESQ; (3) implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan; (4) transformasi nilai-nilai agama dan budaya; (5) mengembangkan tata nilai masyarakat; dan (6) mengembangkan kearifan budaya lokal. Diperlukan sinergi antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam menyukseskan PBP peserta didik yang bersifat kompleks dan menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Checkland, P. 1999. *Soft Systems Methodology: A 30-year Retrospective*. Chichester: John Wiley and Sons, Ltd.
- Checkland, P., dan Poulter, J. 2006. *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners, Teachers, and Students*. Chichester: John Wiley and Sons, Inc.
- Checkland, P., dan Scholes, J. 1990. *Soft System Methodology in Action*. Chichester: John Wiley and Sons, Inc.
- Gunawan, I. 2012. *Mengembangkan Karakter Bangsa Berdasarkan Kearifan Lokal*. Prosiding Seminar Nasional Meretas Sekolah Humanis untuk Mendesain Siswa Sekolah Dasar yang Cerdas dan Berkarakter, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6 Mei, hlm. 67 s.d. 79.
- Gunawan, I. 2015a. *Mengembangkan Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Nilai dan Etika*. Proceeding National Seminar and International Conference Scientific Forum-Faculty of Education Department of Science Education (FIP-JIP), Faculty of Education, Gorontalo State University, Gorontalo, 9 s.d. 11 September, hlm. 302 s.d. 312.
- Gunawan, I. 2015b. *Optimalisasi Peran dan Tugas Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Prosiding Seminar Nasional Implementasi Kebijakan Ujian Nasional, Dualisme Kurikulum, dan Sistem Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Malang, 16 Mei, hlm. 23 s.d. 29.
- Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kartono, K. 1977. *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Kemendikbud. 2015. *Mendikbud Canangkan Program Penumbuhan Budi Pekerti*, (Online), (<http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/4391>, diakses 16 Agustus 2015).
- Khisty, C. J. 1995. Soft-System Methodology as Learning and Management Tool. *Journal of Urban Planning and Development*, 1(1): 91-107.
- Kusmintardjo. 1989. Kepemimpinan dalam Pendidikan. Dalam Soekarto, I., dan Soetopo, H., (Eds.), *Administrasi Pendidikan* (hlm. 251-279). Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Ragil, W. 2009. Membangun Tata Nilai Kepemimpinan Kepala Sekolah / Madrasah. *Jurnal Tenaga Kependidikan*, 3(2): 1-7.
- Rukmana, N. 2014. *Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa*. Tangerang Selatan: SBM Publishing.
- Yadin, A. 2013. Soft Systems Methodology in an Educational Context: Enhancing Students Perception and Understanding. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management, and e-Learning*, 3(5): 351-356.